

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADILAN NEGERI SEKAYU

KELAS II



TAHUN 2021

**JL. MERDEKA NO.485 LK VII
SEKAYU**

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN NEGERI SEKAYU KELAS II
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karuniaNya kami dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sekayu tahun 2021.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sekayu ini adalah penyampaian hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dan kegiatan selama satu tahun anggaran Serta kegiatan dalam mendukung pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran covid 19 pada tahun 2021.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini kami susun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3111/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021, yang berisi Pengantar, Bab I Pendahuluan memuat Kebijakan Umum Peradilan, Visi dan Misi serta Rencana Strategis (Renstra).

Sedangkan pada Bab II berisi Keadaan Perkara, Penyelesaian Perkara dan Akreditasi Penjaminan Mutu. Bab III berisi tentang Sumber Daya Manusia Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan / golongan / pendidikan yang terdiri dari Mutasi, Promosi, Pensiun dan Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti Diklat). Bab IV berisi tentang Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, Teknologi Infomasi. Bab V berisi Peningkatan Pelayanan Publik. Bab VI berisi Pengawasan yang terdiri dari Internal dan Evaluasi. Terakhir Bab VII berisi Kesimpulan dan Rekomendasi.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sekayu tahun 2021 ini. Semoga dengan tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini akan menjadi pedoman untuk perbaikan kinerja pada Pengadilan Negeri Sekayu.

**KETUA
PENGADILAN NEGERI SEKAYU**

BEN RONALD P SITUMORANG, SH, MH
NIP. 19780901200112 1 002

DAFTAR ISI

PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
Bab I	Pendahuluan	1
Bab II	A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum	5
	- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	
	- Keadaan Perkara Tingkat Banding	
	- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	
	- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	
	B. Penyelesaian Perkara	5
	- Jumlah sisa perkara yang diputus	
	- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	
	- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	
	- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi	
	- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi	
	C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	7
	- Posbakum	
	- Sidang Keliling/pelayanan terpadu	
	- Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara)	
Bab III	Sumber Daya Manusia	9
	Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan	
	- Mutasi	
	- Promosi	
	- Pensiun	
	- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)	
Bab IV	Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Teknologi Informasi	19
	A. Pengelolaan Keuangan	
	B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	
	C. Pengelolaan Teknologi Informasi	
	- Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Umum	
	- Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum	
Bab V	Peningkatan Pelayanan Publik	29
	- Akreditasi Penjaminan Mutu	
	- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	
	- Inovasi Pelayanan Publik	
Bab VI	Pengawasan	45
	A. Internal	
	B. Evaluasi	
Bab VII	Penutup	48
	A. Kesimpulan	
	B. Rekomendasi	

BAB I PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Negeri bertugas menerima, memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara yang diajukan.

Sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 diperlukan usaha untuk mewujudkan sebuah Badan Peradilan yang Agung dengan:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proposional.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.
6. Mengelola dan membina Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

Selain hal di atas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan Agenda Pembaharuannya, maka di Pengadilan Negeri Sekayu ada program prioritas, antara lain adalah:

1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan

Dengan adanya SKKMAI/144/2007 maka pada Pengadilan Negeri Sekayu juga telah dibuat program website PN Sekayu dengan alamat: www.pn-sekayu.go.id, program telah

berjalan dengan update setiap saat.

Program penelusuran perkara CTS3 pada Pengadilan Negeri Sekayu telah dapat memberikan informasi pada pencari keadilan.

2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan.

Pada program ini Pengadilan Negeri Sekayu telah menyediakan meja informasi, dan meja pengaduan, dimana meja informasi dan pengaduan ini berada dibawah tanggung jawab Panitera Muda Hukum yang telah memperoleh pelatihan singkat dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Juga tersedia *e-court helpdesk*, yang dapat membantu masyarakat dalam hal informasi mengenai *e-court* dan penggunaan aplikasi *e-court*.

3. Program Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI

Dengan telah diterbitkannya Cetak Biru Mahkamah Agung 2011-2035, Pengadilan Negeri Sekayu berusaha mengadakan perbaikan dan perubahan seperti apa yang tertuang dalam Cetak Biru tersebut.

4. Program mendukung pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran covid 19 dengan mempersiapkan tempat mencuci tangan baik didalam gedung maupun diluar gedung kantor, menyiapkan Hand Sanitizer, penyemprotan disinfektan setiap hari, memeriksa suhu tubuh dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi bagi seluruh pegawai maupun pengunjung yang akan masuk kedalam kantor Pengadilan Negeri Sekayu, sidang secara online, membagikan masker, faceshield, vitamin dan melakukan test antigen secara berkala kepada seluruh pegawai serta menyiapkan aplikasi SI-KUPEK, SILANVATOR, SI-PINTER, PTSP SIMBA (Sinergi MUBA) dan TTE agar kegiatan perkantoran berjalan dengan lancar.

B. VISI dan MISI

1. VISI Pengadilan Negeri Sekayu sesuai dengan Visi Mahkamah Agung-RI

"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung"

2. MISI Pengadilan Negeri Sekayu sesuai juga dengan Misi Mahkamah Agung RI

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
5. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Pengadilan Negeri Sekayu dalam menjalankan tugas dan fungsinya dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sekayu, dalam hal ini Renstra tahun 2020-2024.

1. Renstra Pengadilan Negeri Sekayu merupakan pelaksanaan misi dalam mewujudkan visi secara bertahap. Rencana yang sedang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sekayu pada saat ini adalah disesuaikan dengan Renstra Mahkamah Agung tahun 2020-2024.
2. Renstra sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengadilan Negeri Sekayu lima tahun ke depan, rencana strategis ini dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan yang diselaraskan dengan sub program Pengadilan Tinggi yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan (*action plan*). Rencana strategis ini diharapkan didukung oleh anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang oleh sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Sekayu, baik lingkungan internal maupun eksternal.
3. Pengadilan Negeri Sekayu sebagai bagian dari unit organisasi Mahkamah Agung dalam menjalankan tugas dan fungsi atau kegiatannya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya Rencana Strategis juga dapat dipergunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Sekayu yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI.

Rencana Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran organisasi pada tahun 2020-2024.

1.1. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Sekayu yang dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Sekayu dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Sekayu untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.

Kedua tujuan strategis tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Tujuan akhir dari Pengadilan Negeri Sekayu adalah terlaksananya prinsip *good governance* di lingkungan Pengadilan yang tergambar dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Agar pencapaiannya dapat dilakukan secara maksimal, maka harus ditunjang dengan pelaksanaan berbagai aspek pelaksanaan reformasi yaitu : peningkatan pelaksanaan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas, peningkatan profesionalisme SDM Aparatur yang berbasis kompetensi.

Selain itu, program ini juga diharapkan mampu mendorong mobilitas aparatur, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

BAB II
KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA
DAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

A. KEADAAN PERKARA

Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II terdiri dari Perkara Pidana dan Perkara Perdata. Jumlah perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sekayu pada tahun 2021 secara umum mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dikarenakan adanya pemisahan wilayah hukum Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin. Adapun rincian penyelesaian perkara perdata dan perkara pidana adalah sebagai berikut :

TABEL 2.1
JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS
TEPAT WAKTU

NO	Jenis Perkara	Perkara Masuk	Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	Sisa Perkara	Keterangan
1	Pidana	600	524	76	
2	Pidana Anak	27	22	5	
3	Pidana Lalu Lintas	1746	1746	-	
4	Pidana Ringan	2	2	-	
5	Perdata Gugatan	26	22	4	
6	Perdata Permohonan	17	16	1	
7	Perdata Gugatan Sederhana	72	72	-	

B. PENYELESAIAN PERKARA

Jumlah sisa perkara tahun 2020 yang diputus pada tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2
JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS
PADA TAHUN 2021

No	Jenis Perkara	Jumlah Sisa Perkara	Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	Sisa Perkara	Keterangan
1	Pidana	113	113	-	
2	Pidana Anak	2	2	-	
3	Pidana Lalu Lintas	-	-	-	
4	Pidana Ringan	-	-	-	
5	Perdata Gugatan	8	8	-	
6	Perdata Permohonan	-	-	-	
7	Perdata Gugatan Sederhana	-	-	-	

Jumlah perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II adalah sebagai berikut:

TABEL 2.3
JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU
TAHUN 2021

No	Jenis Perkara	Perkara Masuk	Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	Sisa Perkara	Keterangan
1	Pidana	600	524	76	
2	Pidana Anak	27	22	5	
3	Pidana Lalu Lintas	1746	1746	-	
4	Pidana Ringan	2	2	-	
5	Perdata Gugatan	26	22	4	
6	Perdata Permohonan	17	16	1	
7	Perdata Gugatan Sederhana	72	72	-	

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK pada tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II adalah sebagai berikut :

TABEL 2.4
JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN
UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PK

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara yang Putus	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK			Keterangan
			Banding	Kasasi	PK	
1	Pidana	524	501	524	522	
2	Pidana Anak	22	22	22	22	
3	Pidana Lalu Lintas	1746	1746	1746	1746	
4	Pidana Ringan	2	2	2	2	
5	Perdata Gugatan	22	17	18	22	
6	Perdata Permohonan	16	16	16	16	
7	Perdata Gugatan Sederhana	71	71	71	71	

Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II adalah sebagai berikut :

TABEL 2.5
JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara yang Masuk	Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi	Keterangan
1	Perdata Gugatan	26	2	

Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II adalah sebagai berikut :

TABEL 2.6
JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI
TAHUN 2021

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara yang Masuk	Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi	Keterangan
1	Pidana Anak	27	-	Tidak Berhasil Diversi

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan suatu bentuk komitmen Mahkamah Agung, khususnya Badan Peradilan Umum Dalam Memberikan Pelayanan informasi kepada pencari

keadilan. Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus menerus memperbaiki system Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik. Salah satu wujud dari Badan peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II, yang berada dibawah lingkup Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah melaksanakan program Akreditasi Penjaminan Mutu. Hal ini dibuktikan dengan telah diterimanya Surat Keputusan Nomor : 1045/DJU/SK/OT01.3/3/2021 tentang Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan nilai 712 Predikat A pada tanggal 10 Maret 2021. Adapun beberapa program dalam rangka meningkatkan pelayanan publik diantaranya adalah :

- **Posbakum**

Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Adapun yang menerima manfaat dari kegiatan ini adalah seluruh masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Kabupaten Musi Banyuasin yang mengajukan pelayanan bantuan hukum.

Dalam tahun 2021 Pengadilan Negeri Sekayu telah merealisasikan pelaksanaan posbakum dengan jumlah jam pelayanan sebanyak 312 jam layanan dengan biaya sebesar Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang seluruhnya dibiayai dari anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Sekayu tahun 2021.

- **Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu**

Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sekayu diluar tempat kedudukan gedung Pengadilan Negeri Sekayu dalam bentuk Sidang Keliling atau sidang ditempat sidang tetap. Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Sekayu tidak ada melaksanakan sidang keliling dan sidang ditempat.

- **Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)**

Layanan Pembebasan Biaya Perkara adalah dengan menanggung biaya proses perkara di Pengadilan Negeri Sekayu sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma. Pada Tahun 2021 Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II tidak memiliki anggaran Pembebasan Biaya Perkara.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan suatu organisasi sangat bergantung kepada kualitas, integritas dan kinerja individu yang bekerja didalamnya. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan suatu organisasi tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mempunyai integritas, dedikasi yang tinggi, semangat serta konsistensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Keadaan jumlah pegawai Pengadilan Negeri Sekayu dengan Ketua, Wakil, Hakim, Pejabat Struktural dan Pejabat Pelaksana Staf yang ada sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 berjumlah 31 orang.

TABEL 3.1
DAFTAR NAMA KETUA, WAKIL KETUA, HAKIM,
PEJABAT STRUKTURAL DAN PEJABAT PELAKSANA STAF

NO	NAMA	JABATAN
1	BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H., M.H	KETUA
2	ANNISA NOVIYATI, S.H.,M.H.Li	WAKIL KETUA
3	CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H	HAKIM
4	ANDY WILIAM PERMATA, S.H	HAKIM
5	RIZKIANSYAH, S.H., L.L.M	HAKIM
6	EDO JUNIANSYAH, S.H.	HAKIM
7	ARIEF HERDIYANTO KUSUMO, S.H., MH	HAKIM
8	GERRY PUTRA SUWARDI, S.H.	HAKIM
9	MUHAMAD NOVRIANTO, S.H.	HAKIM
10	LIGA SAPLENDRA GINTING, SH	HAKIM
11	ABUNAWAS, S.H	PANITERA
12	RESSY MIRLIANA SARI, S.H., M.H.	SEKRETARIS
13	HADI CANDRA, S.H	PANITERA MUDA PIDANA
14	ENRIK PEDI ENDORA, S.H., M.M	PANITERA MUDA PERDATA
15	RINA SILVIANA, S.H., M.H.	PANITERA MUDA HUKUM
16	BAMBANG HERMANTO, S.H	PANITERA PENGGANTI
17	BENY HERLAMBANG, S.H	PANITERA PENGGANTI

18	MARINA WIJAYASARI, SH	PANITERA PENGGANTI
19	FAKHRIZAL, S.Kom., S.H.	PANITERA PENGGANTI
20	HERI WIBOWO, SH	PANITERA PENGGANTI
21	HARIYANSAH, S.H., M.H.	PANITERA PENGGANTI
22	SAHRURI, S.Kom	KASUBBAG. UMUM DAN KEUANGAN
23	SHANDIWURI SUNKAR, SH.,MH	KASUBBAG. KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
24	ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom	KASUBBAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN
25	NURUL FATHIYAH, S.Kom	BENDAHARA PENGELUARAN
26	MELLY NORVIANA, A.Md	JURUSITA
27	BUDIMAN	JURUSITA PENGGANTI
28	RIDHA AL HAJ, A.Md	JURUSITA PENGGANTI
29	FATMA OKTAVIANA, S.E.	STAF SUBBAG. KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
30	PERMATA TIEN SUHARTA, S.H.	CPNS
31	LOLYTA SIANTURI, A.Md	CPNS

A. Mutasi

Mutasi Pegawai pada Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II pada tahun 2021 sebanyak 2 (dua) orang antara lain:

TABEL 3.2
NAMA MUTASI PEGAWAI
PANGADILAN NEGERI SEKAYU

NO	N A M A	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	Erdha Octarina, A.Md	Staf Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II	Staf Pengadilan Tinggi Palembang
2.	Novi Liana, S.T., M.H.	Staf Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II	Staf Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B

B. Promosi

Selama tahun 2021, di Pengadilan Negeri Sekayu telah terjadi promosi pegawai sebanyak 6 (enam) orang antara lain :

TABEL 3.3
DAFTAR NAMA PROMOSI JABATAN
PENGADILAN NEGERI SEKAYU

NO	N A M A	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	HENDRA HALOMOAN, S.H., M.H.	KETUA PN SEKAYU	WAKIL KETUA PN BOGOR KELAS IB
2	TYAS LISTIANI, S.H., M.H.	HAKIM PN SEKAYUKELAS II	HAKIM PN LUBUK LINGGAU KELAS IB
3	AHMAD LETONDOT BASARIN, S.H., M.H.	PANMUD PIDANA PN SEKAYU KELAS II	PANITERA PN LAHAT KELAS II
4	RENDY HERMANA, S.H.	PANMUD PERDATA PN SEKAYU KELAS II	PANITERA PENGGANTI PN PALEMBANG KELAS IA KHUSUS
5	IDHAM PRATAMA, S.H.	PANITERA PENGGANTI PN SEKAYU KELAS II	PANMUD PIDANA PN MUARA ENIM KELAS II
6	HADI RAMANSYAH, S.H.	PANITERA PENGGANTI PN SEKAYU KELAS II	PANMUD PIDANA PN KAYU AGUNG KELAS II

C. Pensiun

Pensiun Pegawai pada Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II pada Tahun 2021 sebanyak 0 (nol) orang yaitu :

TABEL 3.4
NAMA PEGAWAI PENSIUN
PENGADILAN NEGERI SEKAYU

NO	N A M A	JABATAN	PENSIUN TMT
-	-	-	-

D. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Data Sumber Daya Manusia Teknis yang mengikuti Diklat Pada Tahun 2021 :

TABEL 3.5
DAFTAR NAMA YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS
PENGADILAN NEGERI SEKAYU

NO	N A M A	JENIS DIKLAT	TANGGAL DIKLAT	KET
1	Sahruri, S.Kom	1. Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan (PKP) Angkatan XVII	04 Januari 2021 s.d 19 April 2021	Terbaik 9
		2. Bimbingan Teknis Umum dan Keuangan (Penatausahaan BMN dan Anggaran)	08 Maret 2021 s.d 10 Maret 2021	
2	Andrianto Fachrizal, S.Kom	1. Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan (PKP) Angkatan XVII	04 Januari 2021 s.d 19 April 2021	
		2. Bimbingan Teknis Rencana Program dan Anggaran	03 Maret 2021 s.d 05 Maret 2021	
		3. Pelatihan Manajemen Laporan Kinerja	14 Juni 2021 s.d 18 Juni 2021	
3	Shandiwuri Sunkar, S.H., M.H.	1. Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan (PKP) Angkatan XVII	04 Januari 2021 s.d 19 April 2021	Terbaik 3
		2. Bimbingan Teknis Kepegawaian (Manajemen ASN)	01 Maret 2021 s.d 03 Maret 2021	
4	Gerry Putra Suwardi, S.H.	1. Pelatihan Teknis Menyusun Resume Putusan Pengadilan (Executive Summary)	18 Februari 2021 s.d 19 Februari 2021	
5	Permata Tien Suharta, S.H.	1. Diklat Latsar CPNS Gol.III	05 April 2021 s.d 19 Juli 2021	
6	Muhamad Novrianto, S.H.	1. Pelatihan Teknis Menyusun Resume Putusan Pengadilan (Executive Summary)	17 Maret 2021 s.d 18 Maret 2021	
7	Ressy Mirliana Sari, S.H., M.H.	1. Bimbingan Teknis Umum dan Keuangan (Penatausahaan BMN dan Anggaran)	08 Maret 2021 s.d 10 Maret 2021	
		2. Bimbingan Teknis Rencana Program dan Anggaran	03 Maret 2021 s.d 05 Maret 2021	
		3. Bimbingan Teknis Kepegawaian (Manajemen ASN)	01 Maret 2021 s.d 03 Maret 2021	

		4.	Pelatihan Manajemen ASN	02 Juni 2021 s.d 07 Juni 2021	
8	Nurul Fathiyah, S.Kom	1.	Bimbingan Teknis Umum dan Keuangan (Penatausahaan BMN dan Anggaran)	08 Maret 2021 s.d 10 Maret 2021	
9	Erdha Octarina, A.Md	1.	Bimbingan Teknis Umum dan Keuangan (Penatausahaan BMN dan Anggaran)	08 Maret 2021 s.d 10 Maret 2021	
10	Novi Liana, S.T., M.H.	1.	Bimbingan Teknis Rencana Program dan Anggaran	03 Maret 2021 s.d 05 Maret 2021	
11	Fatma Oktaviana, S.E.	1.	Bimbingan Teknis Kepegawaian (Manajemen ASN)	01 Maret 2021 s.d 03 Maret 2021	
		2.	Bimbingan Teknis Rekonsiliasi Tingkat UAKPA	23 Desember 2021	
12	Christoffel Harianja, S.H.	1.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia	12 April 2021 s.d 06 Mei 2021	
		2.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator Bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum Gelombang 3 Seluruh Indonesia	26 Juli 2021 s.d 24 Agustus 2021	
13	Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li	1.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XIII	19 Mei 2021 s.d 26 Juni 2021	
		2.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator Bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum Gelombang 3 Seluruh Indonesia	26 Juli 2021 s.d 24 Agustus 2021	
		3.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia	06 September 2021 s.d 08 Oktober 2021	
		4.	Pelatihan Advanced Bagi Hakim Anak Lingkungan Peradilan Umum Tahap 2	22 November 2021 s.d 02 Desember 2021	
14	Melly Norviana, A.Md	1.	Pelatihan Teknis Yudisial Jurusita/ Jurusita Pengganti di Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia	05 Juli 2021 s.d 16 Juli 2021	
15	Rizkiansyah, S.H.,L.L.M.	1.	Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Gelombang 3 Seluruh Indonesia	26 Juli 2021 s.d 04 September	

				2021	
		2.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XV	15 November 2021 s.d 02 Desember 2021	Terbaik 1
16	Andy Wiliam Permata, S.H.	1.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator agi Hakim Lingkungan Peradilan Umum Gelombang 3 Seluruh Indonesia	26 Juli 2021 s.d 24 Agustus 2021	
17	Ahmad Letondot Basarin, S.H., M.H.	1.	Pelatihan Teknis Menyusun Resume Putusan Pengadilan (Executive Summary)	04 Agustus 2021 s.d 05 Agustus 2021	
		2.	Bimbingan Teknis Kepaniteraan	23 Agustus 2021 s.d 25 Agustus 2021	
18	Abunawas, S.H.	1.	Bimbingan Teknis Kepaniteraan	23 Agustus 2021 s.d 25 Agustus 2021	
19	Enrik Pedi Endora, S.H., M.M	1.	Bimbingan Teknis Kepaniteraan	23 Agustus 2021 s.d 25 Agustus 2021	
		2.	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti	25 Oktober 2021 s.d 10 November 2021	
20	Beny Herlambang, S.H.	1.	Bimbingan Teknis Kepaniteraan	23 Agustus 2021 s.d 25 Agustus 2021	
21	Tyas Listiani, S.H., M.H.	1.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XIV	06 September 2021 s.d 19 Oktober 2021	
22	Hendra Halomoan, S.H., M.H.	1.	Pelatihan Teknis Yudisial Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi Hakim Peradilan Umum	13 September 2021 s.d 01 Oktober 2021	
23	Rina Silviana, S.H., M.H.	1.	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti	25 Oktober 2021 s.d 10 November 2021	
24	Liga Saplendra Ginting, S.H.	1.	Pelatihan Teknis Yudisial Hakim Berkelanjutan (CJE) 1 bagi	04 Oktober 2021 s.d 18	

		Hakim Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia	Oktober 2021	
--	--	---	--------------	--

Data Sumber Daya Manusia Non Teknis yang mengikuti Diklat Pada Tahun 2021 :

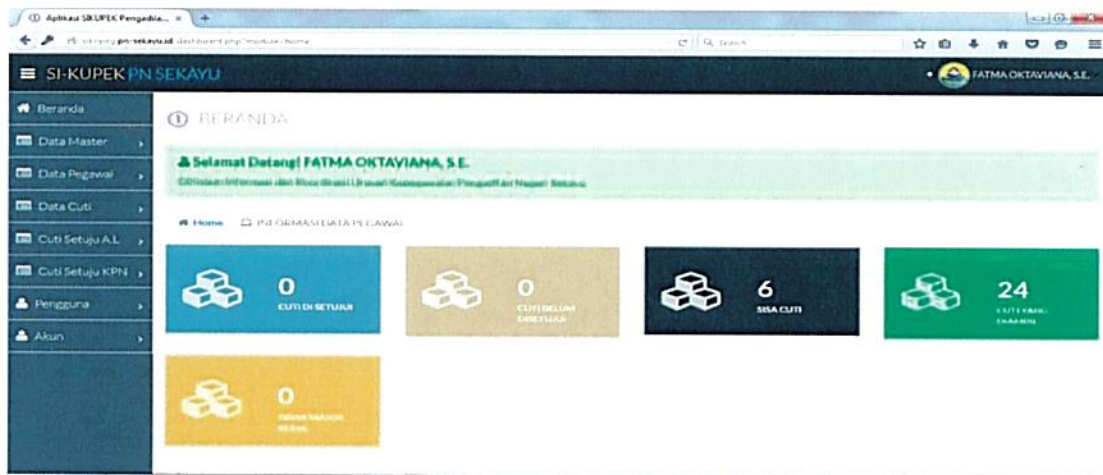
TABEL 3.6
DAFTAR NAMA YANG MENGIKUTI DIKLAT NON TEKNIS
PENGADILAN NEGERI SEKAYU
TAHUN 2021

NO	N A M A	JENIS DIKLAT		TANGGAL DIKLAT	KET
1	Ressy Mirliana Sari, S.H., M.H.	1	Pelatihan Basic Motion Graphic With Adobe After Effect	01 Februari 2021 s.d 05 Februari 2021	
		2	Pelatihan Monitoring Bagi Mentor Peserta PKP	08 Maet 2021 s.d 10 Maret 2021	
		3	Pelatihan Public Speaking and Effective Communication Skill Tahun 2021	15 Maret 2021 s.d 18 Maret 2021	
2	Ahmad Letondot Basarin, S.H., M.H.	1	Pelatihan Basic Video Production	01 Maret 2021 s.d 05 Maret 2021	
		2	Pelatihan Public Speaking and Effective Communication Skill Tahun 2021	15 Maret 2021 s.d 18 Maret 2021	Terbaik 1
3	Muhamad Novrianto, S.H.	1	Pelatihan Public Speaking and Effective Communication Skill Tahun 2021	15 Maret 2021 s.d 18 Maret 2021	
		2	Pelatihan Basic English Communication Skill For Court Tahun 2021	18 Maret 2021 s.d 26 Maret 2021	
4	Shandiwuri Sunkar, S.H., M.H.	1	Pelatihan Public Speaking and Effective Communication Skill Tahun 2021	15 Maret 2021 s.d 18 Maret 2021	
5	Ardiansyah, A.Md	1	Pelatihan Basic Motion Graphic with Adobe After Effect	22 Maret 2021 s.d 26 Maret 2021	
		2	Pelatihan Basic User Experience Design 05	22 Februari 2021 s.d 26	

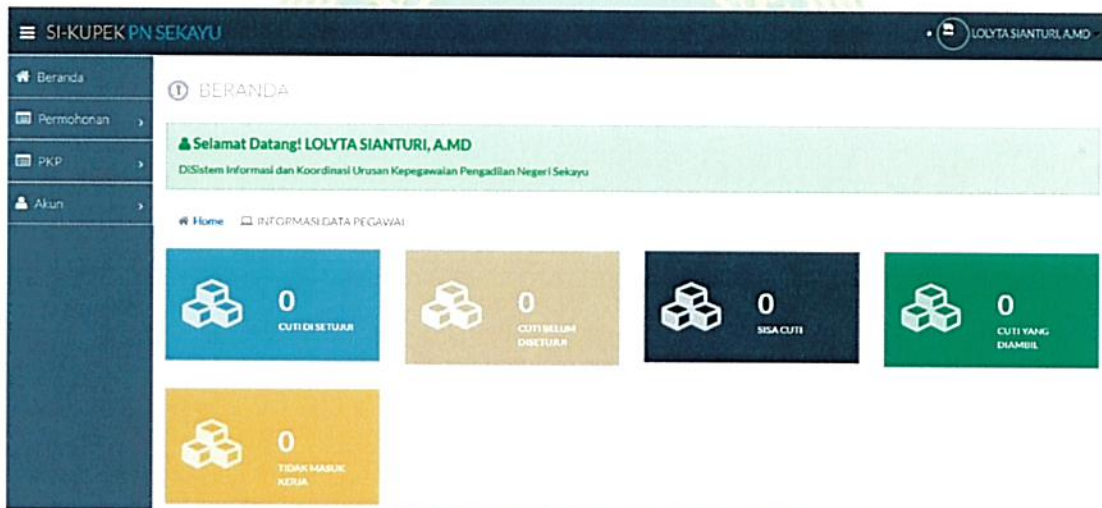
				Februari 2021	
6	Permata Tien Suharta, S.H.	1	Pelatihan English Effective Presentation Bagi CPNS Gol III	16 Juni 2021 s.d 24 Juni 2021	
7	Lolyta Sianturi, A.Md	1	Pelatihan Literasi Digital di Pengadilan Bagi CPNS	10 Agustus 2021 s.d 13 Agustus 2021	

Untuk mendukung program pemerintah dalam mencegah dan memutus mata rantai penyebaran *covid 19* maka Pengadilan Negeri Sekayu berinovasi mengeluarkan Aplikasi SI-KUPEK (Sistem Informasi dan Koordinasi Urusan Kepegawaian). Sistem Informasi dan Koordinasi Urusan Kepegawaian (SI-KUPEK) adalah aplikasi baru yang dikembangkan melalui aplikasi DUK (Daftar Urut Kepangkatan). Aplikasi DUK adalah aplikasi yang digunakan untuk menginput jumlah data pegawai sesuai urutan kepangkatan, gol, dan TMT Jabatan. Pengadilan Negeri Sekayu mempunyai 31 pegawai yang senantiasa selalu berkoordinasi dengan bagian staff kepegawaian jika mereka membutuhkan informasi mengenai kepegawaian. Dalam kurun waktu sekian tahun ini, untuk mendapatkan informasi mengenai kepegawaian (cuti, kenaikan pangkat, gaji berkala, dll) pegawai yang bersangkutan mendatangi langsung bagian kepegawaian, sehingga mengurangi efisiensi waktu serta pegawai harus banyak bertatap muka secara langsung dengan para atasan dan bagian kepegawaian sehingga dapat menyebabkan tingginya penyebaran *covid 19*, selain itu juga bagian kepegawaian membutuhkan waktu pencarian untuk informasi tersebut sehingga mengganggu pekerjaan.

Untuk mengatasi permasalahan diatas mulai dikembangkanlah Aplikasi SI-KUPEK (Sistem Informasi dan Koordinasi Urusan Kepegawaian) untuk mempermudah pegawai mendapatkan informasi kepegawaian tanpa harus mendatangi langsung. Cukup dengan membuka langsung aplikasi ini di *web browser* dengan situs <http://sikupek.pn-sekayu.id> dan login dengan user masing-masing, sehingga mengurangi interaksi secara langsung.



Gambar Aplikasi SI-KUPEK Admin



Gambar Aplikasi SI-KUPEK Pegawai

Adapun salah satu keunggulan aplikasi SI-KUPEK yaitu untuk mengetahui informasi jumlah cuti dan pengajuan cuti pegawai secara langsung. Untuk pengajuan cuti, pegawai yang bersangkutan cukup mengisi form pengajuan yang telah di sediakan pada aplikasi. Pegawai juga dapat melihat apakah cuti sudah di setujui oleh atasan langsung dan pejabat berwenang. Jika sudah di setujui oleh keduanya form pengajuan cuti yang telah diisi langsung bisa dicetak.

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN
TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Secara umum pelaksanaan anggaran DIPA sudah berjalan dengan baik sesuai dengan petunjuk operasional. Adapun rincian pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut :

DIPA 01

Data Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI Tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Sekayu

TABEL 4.1
PAGU DIPA 01

No	Jenis Belanja	Pagu DIPA 01	Total Realisasi		Sisa (Rp)	Ket
			Rupiah	Persentase		
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Pegawai	Rp 3.919.462.000	Rp 3.913.793.579	99,85 %	Rp 5.668.421	
2	Belanja Barang	Rp 1.271.276.000	Rp 1.275.014.192	99,04 %	Rp 12.325.808	

Data Realisasi Anggaran Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI Tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Sekayu

TABEL 4.2
PAGU DIPA BELANJA MODAL

No	Jenis Belanja	Pagu DIPA (Rp)	Total Realisasi		Sisa (Rp)	Ket
			Rupiah	Persentase		
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Modal	65.000.000	64.950.000	99,92%	50.000	1. 1 Paket Mesin Antrian sidang 2. 3 Unit PC

**TABEL 4.3
PENANGANAN PANDEMI COVID 19**

AKUN	PAGU (Rp)	REALISASI	SISA DANA (Rp)
521131 (Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID 19)	7.350.000,-	99,99 %	565,-
521841 (Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID 19)	7.000.000,-	99,91%	5.880,-

DIPA 03

Data Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Sekayu

**TABEL 4.4
PAGU DIPA 03**

No	Jenis Belanja	Pagu DIPA (Rp)	Total Realisasi		Sisa (Rp)	Ket
			Rupiah	Persentase		
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Barang	214.328.000	204.761.100	95,54 %	9.566.900	

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan Sarana dan Prasarana sangat diperlukan untuk menunjang kinerja Pegawai di Lingkungan Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II. Pengelolaan ini meliputi manajemen aset barang milik negara (BMN) dan pengadaan sarana dan prasarana. Aset yang dikelola meliputi Kendaraan Dinas, Rumah Dinas dan Sarana/Prasarana.



Data Keadaan Kendaraan Dinas Pada Tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Sekayu sebagai berikut :





**TABEL 4.5
DATA PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA**







No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Kendaraan Roda 4					
	a. Station Wagon	2005		✓		
	b. Minibus	2010		✓		
	c. Station Wagon	2016		✓		
	d. Station Wagon	2019	✓			
e. Station Wagon	2019	✓				
2	Kendaraan Roda 2					
	a. Motor	2006	✓			
	b. Motor	2008	✓			
	c. Motor	2008	✓			
d. Motor	2012	✓				

Data Keadaan Rumah Dinas Pada Tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Sekayu sebagai berikut :

**TABEL 4.6
DATA KEADAAN RUMAH DINAS TAHUN 2021**

No	Uraian	Foto	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Rumah Dinas Ketua Beralamat di Komp. Pengadilan Jalan Merdeka LK VII Nomor 1 Sekayu		✓			
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua Beralamat di Komp. Pengadilan Jalan Merdeka LK VII Nomor 2 Sekayu			✓		Kondisi Rumah tersebut rusak pada bagian atap, plafond, lantai dan kamar mandi

3.	Rumah Dinas Hakim Beralamat di Komp. Pengadilan Jalan Merdeka LK VII Nomor 3 Sekayu			✓		Kondisi Rumah tersebut rusak pada bagian atap, plafond, lantai dan kamar mandi
4.	Rumah Dinas Hakim Beralamat di Komp. Pengadilan Jalan Merdeka LK VII Nomor 5 Sekayu			✓		Kondisi Rumah tersebut rusak pada bagian atap, plafond, lantai dan kamar mandi
5.	Rumah Dinas Hakim Beralamat di Komp. Pengadilan Jalan Merdeka LK VII Nomor 6 Sekayu			✓		Kondisi Rumah tersebut rusak pada bagian atap, plafond, lantai dan kamar mandi
6.	Rumah Dinas Hakim Beralamat di Jalan Pramuka Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu			✓		Posisi / letak Rumah tersebut lebih rendah dari jalan raya sehingga jika hujan turun sering mengalami banjir disamping itu juga atap dan lantai juga rusak ringan

7.	Rumah Dinas Hakim Beralamat di Jalan Pramuka Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu			✓		Posisi / letak Rumah tersebut lebih rendah dari jalan raya sehingga jika hujan turun sering mengalami banjir disamping itu juga atap dan lantai juga rusak ringan
8.	Rumah Dinas Hakim Beralamat di Jalan Merdeka Kel. Balai Agung Kec. Sekayu			✓		Kondisi Rumah tersebut rusak pada bagian atap, plafond, lantai dan kamar mandi
9.	Rumah Dinas Hakim Beralamat di Jalan Koprak Hanafiah Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu				✓	Kondisi rumah ini sudah hancur berat dan tidak layak dihuni
10	Rumah Dinas Panitera Beralamat di Komp. Pengadilan Jalan Merdeka LK VII Nomor 7 Sekayu	 		✓		Kondisi Rumah tersebut rusak pada bagian atap, plafond, lantai dan kamar mandi
11	Rumah Dinas Sekretaris Beralamat di Komp. Pengadilan Jalan Merdeka LK VII Nomor 4 Sekayu			✓		Kondisi Rumah tersebut rusak pada bagian atap, plafond, lantai dan kamar mandi



Dan Sub Bagian Umum dan Keuangan telah berupaya melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap rumah negara tersebut dengan menggunakan anggaran belanja operasional pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya. Akan tetapi karena terkait dengan aturan nilai kapitalis pemeliharaan gedung dan bangunan sehingga pemeliharaan tersebut tidak maksimal. Dan Sub Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan juga telah berulang kali mengajukan perencanaan Belanja Modal Renovasi dan Rehabilitasi Rumah Negara akan tetapi belum di anggarkan oleh Mahkamah Agung RI.

SARANA DAN PRASARANA GEDUNG

Gedung Kantor Pengadilan Negeri Sekayu dibangun di atas tanah seluas 6.446m², terdiri dari 2 (dua) lantai, dimana Ruang Ketua, Wakil Ketua, Ruang-Ruang Hakim yang terintegrasi dengan Ruang Panitera Pengganti, Ruang Panitera, Ruang Sekretaris, Ruang Command Center, Ruang Arsip, Ruang Alat, Ruang *Pantry*, Ruang Tamu Terbuka, Ruang Server, Ruang Dharmayukti Karini dan Ruang Rapat berada di lantai 2.

Adapun penataan ruangan-ruangan sebagai berikut:

1. 4 (empat) ruang sidang yang terdiri dari 1 (satu) ruang sidang utama, 1 (satu) ruang sidang khusus anak dan 2 (dua) ruang sidang biasa.
2. Ruang Kerja Ketua/Wakil Ketua, satu ruang masing-masing untuk Ketua dan Wakil Ketua, yang mana ruang kerja Ketua juga untuk menerima tamu dan dilengkapi dengan toilet dan AC. Begitu juga dengan ruang kerja Wakil Ketua.
3. Ruang Rapat pimpinan yang terkoneksi dengan ruang Ketua .

Selain yang tersebut diatas masih ada Ruang Panitera, berdekatan dengan ruang Wakil Ketua, Ruang Sekretaris, Ruang Kepaniteraan, terdiri dari Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Hukum yang terhimpun menjadi satu kesatuan ruang, Ruang Kesekretariatan yang juga terhimpun menjadi satu Ruang, Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala dan Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan, Ruang Posbakum, Ruang Tunggu Jaksa, Ruang Tahanan, Ruang Tunggu Penasehat Hukum. Sedangkan pada bagian belakang Gedung Kantor Pengadilan Negeri Sekayu terdapat Ruang Perpustakaan, Ruang Arsip, Ruang Ramah Anak, Ruang Klinik, Ruang Laktasi, dan Ruang Teleconference.

Pada Tahun Anggaran 2021, Pengadilan Negeri Sekayu mendapatkan Anggaran Belanja Modal peralatan dan mesin alat pengolah data dan komunikasi berupa 3 unit PC Komputer untuk Kepaniteraan dan 1 paket peralatan Antrian Sidang.

SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG

Hal-hal yang dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas Pengadilan antara lain adanya sarana dan prasarana fasilitas yang menunjang. Dalam hal ini sarana dan prasarana fasilitas gedung yang adadi Pengadilan Negeri Sekayu adalah:

**TABEL 4.7
SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG
PENGADILAN NEGERI SEKAYU**

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	3	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang	4	
7	Ruang Kepaniteraan	1	
8	Ruang Kesekretariatan	1	
9	Ruang Panitera Pengganti	3	
10	Ruang Perpustakaan	1	
11	Ruang Posbakum	1	
12	Ruang Tunggu Jaksa	1	
13	Ruang Tahanan dewasa dan anak	4	
14	Ruang tunggu Penasehat Hukum	1	
15	Ruang Ramah Anak	1	
16	Ruang Klinik	1	
17	Ruang Laktasi	1	
18	Ruang Teleconference	1	
19	Komputer	28	
20	Laptop	11	
21	Infokus	1	
22	PABX	1	
23	AC	40	
24	Faximile	1	
25	Genset	2	
26	Handycam	2	
27	LCD Monitor	6	
28	Scanner	3	
29	Server	2	
30	Alat sidik jari	7	
31	CCTV	2	
32	Router	1	

33	Brangkas	1	
34	Filling Kabinet	17	
35	Lemari Besi	8	
36	Gordyn	1	
37	Sounds System	8	
38	Meja kerja kayu	80	
39	Kursi besi/metal	173	
40	Lemari Kayu	21	
41	Kursi tamu	9	
42	Lemari Toga	-	
43	Kursi kayu	121	
44	Meja sidang	5	
45	Kursi sidang hakim	9	
46	Bangku panjang besi/metal	22	
47	Sekat ruang sidang	12	
48	Rak Besi	11	
49	Rak Kayu	8	
50	Fire Alarm	1	
51	Video Monitor	1	
52	Desk Info	1	

Untuk Tahun Anggaran 2021 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta Peralatan dan Mesin telah dimaksimalkan penggunaannya, diantaranya untuk pemeliharaan gedung bangunan dan halaman gedung, pemeliharaan rumah dinas, pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan kendaraan dinas roda 4, komputer, printer, AC Split, dll. Barang milik negara tersebut telah dalam proses pengajuan penetapan status penggunaan.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

- Implementasi e-court di Lingkungan Peradilan Umum

Sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018, tentang administrasi pengadilan secara elektronik, diciptakanlah suatu sistem layanan yang dapat memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sistem layanan "*ecourt*" ini, adalah perangkat yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam proses pendaftaran perkara di Pengadilan dan pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik.

Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Sekayu telah mengimplementasikan e-court sejak tahun 2019. Sosialisasi mengenai e-court juga telah disampaikan kepada intern Pengadilan Negeri Sekayu, Pemkab Musi Banyuasin, Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, Kepolisian Resor Musi Banyuasin dan Para Advokat. Jumlah perkara yang telah mendaftar melalui e-court tahun 2021 adalah sebanyak :

TABEL 4.8
Jumlah Perkara yang mendaftar melalui e-court
PENGADILAN NEGERI SEKAYU

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara yang Masuk	Jumlah Perkara yang diselesaikan	Sisa Perkara yang belum diselesaikan
1.	Gugatan	26	13	13
2.	Gugatan Sederhana	71	71	0
3.	Permohonan	16	15	1
4.	Banding	3	3	0

- Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum

SIPP merupakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang dikembangkan Mahkamah Agung dan wajib digunakan oleh Pengadilan Negeri seluruh Indonesia untuk memberikan layanan informasi kepada publik, yang diharapkan dapat memiliki manajemen informasi yang menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu. Pengadilan Negeri Sekayu telah melakukan peningkatan kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan pengisian data SIPP. Nilai capaian pengisian SIPP dapat dilihat pada Evaluasi Implementasi SIPP yang dapat diakses dengan alamat website <http://evaluasi.badilum.mahkamahagung.go.id/>.

Berikut Nilai capaian pengisian SIPP Pengadilan Negeri Sekayu per tanggal 31 Desember 2021 dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang:

Aplikasi Monitoring SIPP

URL : <http://192.168.10.10/mis>



Aplikasi monitoring yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memonitor kepatuhan pengguna dalam mengisi aplikasi SIPP.

Aplikasi SIPP

URL: <http://sipp.pn-sekayu.go.id/>

Akses Untuk masyarakat umum dan pencari keadilan.

Local:<http://srv-sipp.pn-sekayu.go.id>



Manajemen administrasi di internal Pengadilan Negeri Sekayu, dijalankan oleh seluruh bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu beserta Panitera Pengganti. Sampai saat ini Pengadilan Negeri Sekayu telah menerapkan SIPP versi 4.1.1 yang telah terintegrasi dengan SIPP Pengadilan Tinggi Palembang maupun Mahkamah Agung. Data sudah termutakhirkan berdasarkan kondisi data perkara yang sebenarnya.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan salah satu mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan. Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus menerus memperbaiki *system* Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Salah satu regulasi yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu SK KMA nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan informasi di Pengadilan dan SK KMA nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Pelayanan prima harus terus ditingkatkan diseluruh Direktorat Jenderal Badan Peradilan, terutama pada pelayanan yang masih mendapat keluhan dari publik, antara lain Jadwal sidang dan layanan informasi di Pengadilan.

Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II, yang berada di bawah lingkup Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah melaksanakan program Akreditasi Penjaminan Mutu. Hal ini dibuktikan dengan telah diterimanya Surat Keputusan nomor : 1045/DJU/SK/OT01.3/3/2021 tentang Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan nilai 712 Predikat A pada tanggal 10 Maret 2021. Tidak sampai disitu, Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II juga berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan yang baik dan bersih bagi seluruh masyarakat pencari keadilan. Berdasarkan Peraturan Menpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Pengadilan Negeri Sekayu telah melakukan penancangan pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sejak tanggal 26 Februari 2019 sebagai wujud kesungguhan institusi Pengadilan Negeri Sekayu dalam memantapkan jati diri dan identitas sebagai lembaga yang mempunyai komitmen untuk mencegah terjadinya korupsi disertai dengan upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Berikut beberapa Publikasi yang dilakukan Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II dalam upaya Menuju WBK WBBM dengan mengadakan *Public Campaign* yaitu berupa penayangan video Sosialisasi Zona Integritas Pengadilan Negeri Sekayu yang ditayangkan di videotron milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang terletak di Alun-alun kota Sekayu Tahun 2021.



Gambar penayangan video pencanangan Zona Bebas dari Korupsi yang ditayangkan melalui videotron yang terletak di alun-alun kota Sekayu



GambarPencanangan Zona Integritas PN Sekayu yang di upload di Website PN Sekayu



Gambar Spanduk Pencanangan Zona Integritas PN Sekayu yang terletak di depan Kantor PN Sekayu

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan. Perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan Pengadilan Negeri melalui satu pintu. Wujud keseriusan Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya terhadap penerapan PTSP tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang perubahan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.

Adapun tujuan dari PTSP adalah Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku. Penyelenggaraan PTSP Pengadilan Negeri

Sekayu Kelas II dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Hukum, serta Subbagian Umum dan Keuangan.



Gambar Ruang Pelayanan PTSP

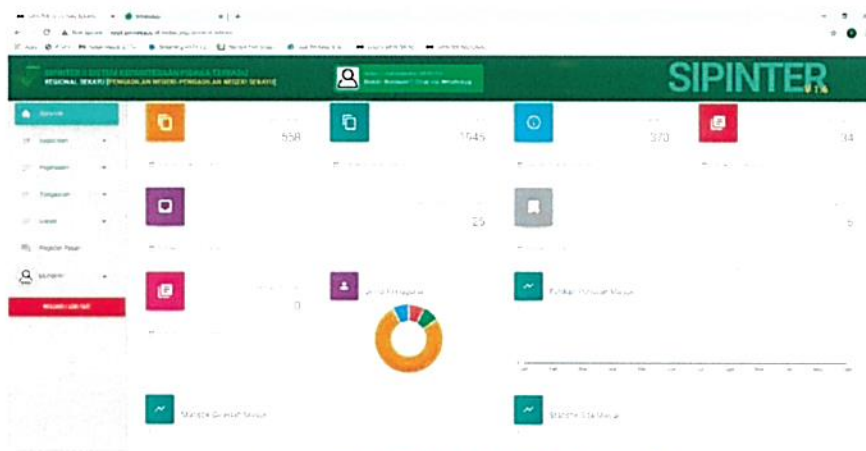
C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan informasi dan percepatan bagi para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Sekayu serta peningkatan kinerja bagi Pegawai Pengadilan Negeri Sekayu, maka perlu adanya Inovasi dan pengembangan beberapa aplikasi dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Berikut beberapa inovasi dikembangkan oleh tim IT di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II :

1. Aplikasi SIPINTER (Sistem Kepaniteraan Pidana Terpadu)

Aplikasi Sistem Pelayanan Pidana Terpadu (SIPINTER) merupakan pengembangan dari Aplikasi Sistem Pelayanan Pidana Terpadu (SPPT). SIPINTER merupakan sebuah aplikasi yang dipasang di hosting internet untuk memberikan pelayanan Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Sekayu, tujuannya untuk mempermudah proses permohonan yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Negeri Sekayu, dimana sebelumnya para pemohon mengajukan permohonan harus datang ke Pengadilan Negeri Sekayu secara langsung, dengan adanya aplikasi ini maka para pemohon hanya meng *upload* dokumen yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri Sekayu.



Gambar Beranda Aplikasi SIPINTER

Pengadilan Negeri Sekayu memiliki wilayah hukum yang cukup luas yakni 14.477 KM², sehingga jarak tempuh dari pemohon ke Pengadilan Negeri Sekayu relatif jauh dan waktu tempuh juga lama, jalan yang dilalui juga terdiri dari jalan rusak dan jalan tanah, hal ini memperbesar resiko diperjalanan, instansi pengguna layanan Kepaniteraan Muda Pidana terdiri dari:

1. Polres Musi Banyuasin
2. Polsek Sekayu
3. Polsek Babat Toman
4. Polsek Sanga Desa
5. Polsek Keluang
6. Polsek Tungal Jaya
7. Polsek Sungai Lilin
8. Polsek Babat Supat
9. Polsek Lais
10. Polsek Bayung Lencir
11. Polsek Sungai Keruh
12. Polsek Batang Hari Leko
13. Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin
14. Lembaga Pemasyarakatan Sekayu

Dimana para pengguna dari kepolisian dapat mengajukan permohonan sehubungan dengan :

1. Persetujuan/izin penyitaan
2. Persetujuan/izin penggeledahan
3. Perpanjangan Penahanan
4. Penetapan diversi

No.	Tanggal Register	No. Perkara Pengadilan	Pemohon Banding	Status Banding	Pengaju	Status	Aksi
1	13 Desember 2021	170 P.d.Sus.2021/PN.Sk	13 Desember 2021 Terdakwa Nova Adela Binti Cahaya	Pemohonan Banding	Pengadilan negeri Sekayu	TERIMA	9
2	16 November 2021	164 P.d.Sus.2021/PN.Sk	16 November 2021 Penuntut Umum Ade Rachmad Hidayat, S.H	Pemohonan Banding	Pengadilan negeri Sekayu	TERIMA	9
3	08 November 2021	162 P.d.Sus.2021/PN.Sk	08 November 2021 Rozaki Kusala Sa, Terdakwa Sugand Br Malik Am	Pemohonan Banding	Pengadilan negeri Sekayu	TERIMA	9
4	02 November 2021	236 P.d.Sus.2021/PN.Sk	02 November 2021 Penuntut Umum Ade Rachmad Hidayat, S.H	Pemohonan Banding	Pengadilan negeri Sekayu	TERIMA	9
5	27 Oktober 2021	147 P.d.Sus.2021/PN.Sk	27 Oktober 2021 Bintang Iswan, Kusala dan Terdakwa Adnan Hakim Bin Haidar Bep, Am	Pemohonan Banding	Pengadilan negeri Sekayu	TERIMA	9
6	13 Oktober 2021	104 P.d.Sus.2021/PN.Sk	13 Oktober 2021 Penuntut Umum hendri ih	Pemohonan Banding	Pengadilan negeri Sekayu	TERIMA	9
7	27 September 2021	239 P.d.Sus.2021/PN.Sk	27 September 2021 Roni Siregar, SH, Kusala dan Terdakwa Ruslan Adnan Asad Awan Bin Suban Rasa	Pemohonan Banding	Pengadilan negeri Sekayu	TERIMA	9

Gambar Menu Laporan Banding dari Pengadilan Negeri

No.	Tanggal Register	Tersangka	Jaminan	Pemohon	Status	Aksi
1	03 Januari 2022	ABR ANGGARA BIN DINDI	Keagen PT Perpanjangan Pertama dan kedua PT	Pengadilan negeri Lela	TERIMA	16
2	03 Januari 2022	BAMBANG TINDO DE FIANAN BIN SAPUTRO	Keagen PT Perpanjangan Pertama dan kedua PT	Pengadilan negeri Batu Aja	TERIMA	16
3	30 Desember 2021	SUPRINDO ALS SUPRI BIN SAKRUL ALFA	Keagen PT Perpanjangan Pertama dan kedua PT	Pengadilan negeri Batu Aja	TERIMA	16
4	10 Desember 2021	MEDIYANTO BIN JANTO	Keagen PT Perpanjangan Pertama dan kedua PT	Pengadilan negeri Batu Aja	TERIMA	16
5	10 Desember 2021	JANIB BIN SALAM	Keagen PT Perpanjangan Pertama dan kedua PT	Pengadilan negeri Batu Aja	TERIMA	16
6	28 Desember 2021	RENALDI ANWAR BIN DAMRUS	Keagen PT Perpanjangan Pertama dan kedua PT	Pengadilan negeri Pengkajene Baka	TERIMA	16
7	28 Desember 2021	SUPRI AWAL ASUNG BIN	Keagen PT Perpanjangan Pertama dan kedua PT	Pengadilan negeri Pengkajene Baka	TERIMA	16

Gambar Menu Perpanjangan Penahanan yang diterima oleh Pengadilan Tinggi

No.	Tanggal Register	No. Perkara Pengadilan	Pemohon Banding	Status Banding	Pengaju	Status	Aksi
1	27 Desember 2021	340/Pid.B.2021/PN.LH	27 Desember 2021 Pemukul Umum NOVAL AMARA NUGRANA S.H	Pemohonan Banding	Pengadilan Negeri Lanjut	DISERJAN	DL
2	23 Desember 2021	350/Pid.B.2021/PN.BTA	17 Desember 2021 Pemukul Umum DANI MEGA SAKTI S.H.M.H	Pemohonan Banding	Pengadilan Negeri Batubara	DISERJAN	DL
3	22 Desember 2021	307/Pid.Sus.2021/PN.LH	20 Desember 2021 Pemohonan Banding ADLI PTRI ANGVIAN S.H	Pemohonan Banding	Pengadilan Negeri Lanjut	DISERJAN	DL
4	22 Desember 2021	236/Pid.Sus.2021/PN.LH	21 Desember 2021 Pemohonan Banding MUHAMMAD ABBY HAE BULLAH S.H	Pemohonan Banding	Pengadilan Negeri Lanjut	DISERJAN	DL
5	17 Desember 2021	486/Pid.B.2021/PN.BTA	14 Desember 2021 Pemohonan Banding HENRI DJUNAN S.H	Pemohonan Banding	Pengadilan Negeri Batubara	DISERJAN	DL
6	13 Desember 2021	340/Pid.Sus.2021/PN.Sk	13 Desember 2021 Pemohonan Banding Nova Adh B Eri Cahaya	Pemohonan Banding	Pengadilan Negeri Sekayu	DISERJAN	DL
7	13 Desember 2021	566/Pid.Sus.2021/PN.BTA	05 Desember 2021 Pemohonan Banding MARDIANAH ALIAD LUKING BIN KUDMAN	Pemohonan Banding	Pengadilan Negeri Batubara	DISERJAN	DL

Gambar Menu Laporan Banding yang diterima oleh Pengadilan Tinggi

Dengan adanya aplikasi SIPINTER ini maka para pemohon atau pengguna aplikasi dapat dengan langsung mengajukan permohonan melalui aplikasi dan akan segera diproses dan di validasi melalui aplikasi tersebut juga, ataupun para pengguna juga akan mendapatkan informasi sehubungan dengan perkara pidana yang sedang ditangani di Pengadilan Negeri Sekayu.

2. Aplikasi Antrian PTSP

Sesuai dengan amanat Perdirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018, yang mengharuskan setiap Pengadilan untuk memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terdiri dari Pelayanan Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Hukum dan Bagian Umum, guna mempermudah pengguna layanan Pengadilan tersebut. Untuk menunjang pelayanan tersebut maka Pengadilan Negeri Sekayu juga membuat aplikasi antrian sidang agar para pengguna layanan PTSP dapat mengetahui kapan akan dilayani oleh masing-masing bagian tersebut

Hal ini tentunya akan menciptakan keteraturan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat.



PENGADILAN NEGERI SEKAYU

JALAN MERDEKA NO. 485 SEKAYU TELP. (0714) 321020 FAX. (0714) 321281

Jumat / 31 Desember 2021, 11:48:2



Copyright © Pengadilan Negeri Sekayu, 2018

Gambar Antrian PTSP

3. Aplikasi Antrian Sidang

Layanan utama Pengadilan Negeri adalah pelayanan persidangan perkara, baik perkara Pidana maupun perkara Perdata. Jumlah perkara di Pengadilan Negeri Sekayu pada tahun 2021 adalah :

1. Perkara Pidana Biasa : 600
2. Perkara Pidana Anak : 27
3. Perkara Perdata Gugatan : 26
4. Perkara Perdata Gugatan Sederhana : 72
5. Perkara Permohonan : 17

Untuk memberikan pelayanan yang optimal, maka untuk proses persidangan juga dibuat aplikasi antrian sidang, sehingga dalam memberikan pelayanan masyarakat mengetahui kapan perkara tersebut akan disidangkan. Dimana rata-rata dalam 1 (satu) hari majelis hakim menyidangkan 15-20 perkara.



Gambar Antrian Sidang



Gambar Persidangan secara *Online*

4. Tanda Tangan Elektronik

Dengan telah dikembangkannya beberapa layanan dengan memanfaatkan teknologi seperti SPPT yang mengharuskan pemohon untuk meng-*upload* dokumen secara elektronik kemudian Pengadilan Negeri Sekayu juga mengoptimalkan pelayanan dengan cara menerapkan Tanda Tangan Elektronik yang sesuai dengan Pasal 11 ayat 1, UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 52 ayat 1 dan 2 PP No 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Serta Peraturan OJK No 77/2016 pasal 1 ayat 15. Sehingga dokumen yang dihasilkan akan ditandatangani secara elektronik oleh Pengadilan Negeri Sekayu yang telah tersertifikasi oleh BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) Jakarta, sehingga dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang di tandatangi secara konvensional.



Gambar Dokumen Yang Ditandatangani Secara Elektronik

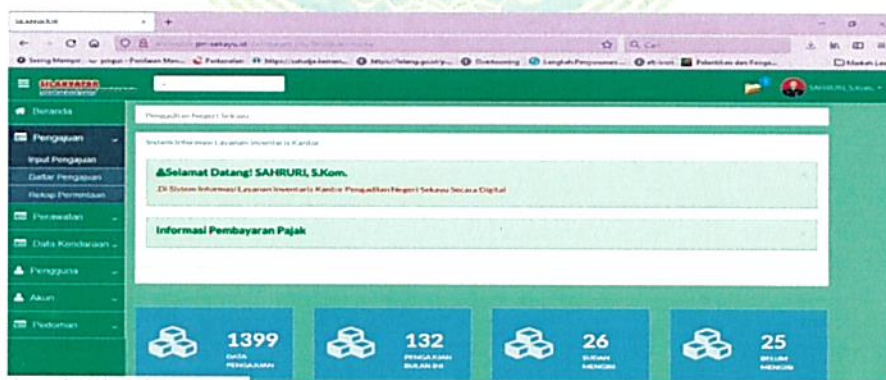
5. Aplikasi SILANVATOR

Aplikasi SILANVATOR (Sistem Informasi Layanan Inventaris Kantor) adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mempermudah Sub Bagian Umum dan Keuangan dalam menghitung Permintaan Alat Tulis Kantor. Sub Bagian Umum dan keuangan Pengadilan Negeri Sekayu selama ini dalam pengajuan ATK (Alat Tulis Kantor) masih menggunakan cara manual dengan membuat form permintaan ATK (Alat Tulis Kantor) dan didistribusikan ke setiap ruangan. Sedangkan untuk perekapannya, Sub Bagian Umum dan Keuangan harus menghitung setiap permintaan ATK dari setiap ruangan kemudian mengelompokkannya. Setelah itu hasil dari rekap tersebut di input ke dalam komputer menggunakan *Microsoft Office Excel* untuk mengetahui jumlah permintaan ATK pada Pengadilan Negeri Sekayu.

Permintaan ATK dengan cara di atas masih belum efektif karena selain dengan telah berkembangnya teknologi pada saat ini, cara tersebut membuat suatu pekerjaan menjadi lebih lama dan membutuhkan kesabaran yang maksimal untuk menghitung dan mengelompokkan ATK di setiap lembaran yang diberikan dari setiap ruangan, belum lagi nama barang yang ditulis kurang spesifik mengakibatkan pengelompokan daftar barang ATK membutuhkan waktu yang lama.

Oleh karena itu maka dicarilah solusi untuk mengatasi masalah tersebut dan dibuatlah aplikasi SILANVATOR ini karena dengan aplikasi ini setiap ruangan yang akan mengajukan permintaan tidak perlu lagi menggunakan form permintaan tetapi dapat langsung memilih barang yang dibutuhkan di daftar ATK pada aplikasi tersebut, pengguna dapat langsung login pada <http://silanvator.pn-sekayu.id/>.

Kemudian pengguna dapat langsung menginput pengajuan pada menu pengajuan-input pengajuan.



Gambar Aplikasi SILANVATOR

Keuntungan menggunakan aplikasi ini selain cepat dan efisien aplikasi ini tidak menggunakan media kertas dalam pengajuan permintaan ATK. Aplikasi ini juga tersistem untuk mengetahui rekap permintaan dari setiap ruangan dalam aplikasi dan bisa dilihat pada halaman admin untuk dicetak.

No	Nama Region	Jumlah Pengajuan Barang	Aksi
1	BAMISANGI BERMANTEL, SAH	1	[Icons]
2	Geray Putra Sesewati	4	[Icons]
3	Hadi Candia, S.H.	15	[Icons]
4	HARIYANSAH, S.H., M.	5	[Icons]
5	JS	9	[Icons]
6	Kepercayaan dan OrLata	4	[Icons]
7	Panditera	2	[Icons]
8	Panmad Hutsum	13	[Icons]
9	Paranmad Paradata	9	[Icons]
10	panpani	13	[Icons]
11	POS	2	[Icons]

Gambar Daftar Pengajuan di Halaman Admin

6. Aplikasi PTSP SIMBA(Sinergi MUBA)

Adalah Layanan Aplikasi PTSP Sinergi Muba dan merupakan aplikasi layanan hukum yang diprakarsai oleh Pengadilan Negeri Sekayu bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bertujuan untuk mempermudah masyarakat mengakses semua informasi serta layanan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat meliputi Permohonan Ganti Nama(E-Court), Surat Keterangan Tidak Pidana (Eraterang), Informasi Sidang (SIPP) dan Info Tilang.



Gambar Aplikasi PTSP SIMBA

Keunggulan aplikasi Sistem Informasi ini bisa mempermudah masyarakat yang jauh dari area sekayu untuk membuat Suket, permohonan ganti nama, dan informasi SIPP tanpa harus datang ke Pengadilan Negeri Sekayu cukup ke kantor Kecamatan masing-masing.

7. Mobil Antar Jemput Difabel

Layanan Mobil antar jemput difabel pengguna layanan PTSP ini dibuat, guna mempermudah bagi Penyandang difabel untuk mendapatkan pelayanan kantor Pengadilan Negeri Sekayu dan Pengadilan Negeri Sekayu telah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. guna mengsosialisasikan inovasi tersebut, agar pesan tersebut sampai ke masyarakat luas. Dimana Penyandang difabel yang akan menggunakan layanan Pengadilan Negeri Sekayu akan dijemput dan diantarkan kembali kerumahnya dan menggunakan mobil dinas kantor Pengadilan Negeri Sekayu dengan cara 2 hari sebelum menggunakan layanan tersebut pengguna layanan dapat menghubungi call center yang dikemudian akan diteruskan ke sekretaris kemudian apabila mendapat persetujuan maka pengguna layanan akan segera dijemput dan diantarkan, untuk sementara layanan tersebut hanya mencakup wilayah kota sekayu saja.



Gambar Mobil Layanan Antar Jemput Difabel Pengadilan Negeri Sekayu

8. Self Service Corner

Self Service Corner adalah sarana yang diberikan bagi masyarakat pengguna layanan PTSP untuk melengkapi dokumen persyaratan layanan yang dibutuhkan etika terdapat kekurangan/ kesalahan pada berkas/dokumen yang dibutuhkan, sehingga masyarakat tidak perlu mencari tempat yang menyediakan jasa rental atau kembali kerumah untuk memperbaiki berkas tersebut. Sarana yang diberikan pada self service corner berupa komputer, printer, kertas dan jaringan internet yang memadai dan layanan tersebut diberikan secara Gratis



Gambar Pojok Layanan Mandiri

9. Ruang Pengaduan

Ruang pengaduan adalah sarana yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan PTSP yang merasa kurang puas terhadap layanan PTSP dan di ruang pengaduan ini masyarakat akan dilayani langsung oleh penanggung jawab pelaksanaan atau pejabat pengelola PTSP. Ruang pengaduan di fasilitasi dengan minuman ringan, ruang yang nyaman dan berAC



Gambar Ruang Pengaduan

BAB VI PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pelaksanaan Pengawasan Internal Pengadilan Negeri Sekayu berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional. Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung yaitu terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri selaku Pimpinan Pengadilan bertindak sebagai Koordinator Pengawasan dengan mengkoordinir para Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu. Pada Pengadilan Negeri Sekayu pelaksanaan pengawasan melekat telah dilakukan oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu. Untuk Hakim-Hakim pelaksanaan pengawasan melekat ada pada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sedangkan pada pejabat Kepaniteraan, pejabat struktural maupun tenaga fungsional lainnya dilakukan oleh Panitera dan Sekretaris. Untuk staf dilakukan oleh masing-masing pejabat kepaniteraan maupun pejabat strukturalnya.

Sedangkan untuk Pengawas bidang telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang, Jurubicara, E-court dan PTSP berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu No.W6.U7/1790/KP.04.6/XI/2021. Hakim Pengawas Bidang melaksanakan pengawasan pada bidang masing-masing kemudian membuat laporan pengawasan setiap 1 (satu) bulan yang disampaikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu dengan Nomor W6.U7/1775/KP.04.12/XII/2021 tentang Penunjukkan Hakim Pengawas dan Pengamat pada Pengadilan Negeri Sekayu. Hakim Pengawas dan Pengamatan mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Gambar Ketua, Wakil Ketua, Hakim Pengawas, Panitera, Sekretaris dan Ka Sub Bag sedang melakukan Briefing terhadap petugas PTSP dan Security



Gambar Hakim Pengawas Bidang sedang melakukan pengawasan



Gambar Rapat Bulanan sekaligus Pemantauan Kinerja

B. EVALUASI

Salah satu fungsi pengawasan adalah sebagai bahan evaluasi guna peningkatan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang. Temuan-temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan ini akan menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja untuk perbaikan dimasa mendatang.

Pengadilan Negeri Sekayu pada tahun 2021 telah melakukan evaluasi atas Hasil Pengawasan terhadap bidang-bidang yaitu dengan :

1. Melaksanakan rapat pengawasan bidang masing-masing setiap bulan pada minggu kedua dilanjutkan dengan pelaksanaan rapat rutin bulanan setiap bulan pada minggu ketiga untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja Pengadilan Negeri Sekayu.
2. Monitoring dan Evaluasi untuk memastikan bahwa masing-masing bidang sudah menindaklanjuti hasil temuan pengawasan setiap bulan pada minggu keempat.



Evaluasi penilaian Kinerja Tenaga Honorar

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman dan kebijakan maupun program kerja yang telah ditetapkan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan juga telah dilakukan secara maksimal dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada serta sarana dan prasarana yang ada.

Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Sekayu sudah lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap masing-masing bidang, baik yang menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum sudah dilaksanakan dengan baik. Pengadilan Negeri Sekayu juga berupaya untuk semakin meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di pengadilan.

Secara umum, kualitas administrasi peradilan dan administrasi umum pada Pengadilan Negeri Sekayu telah diupayakan untuk berjalan semaksimal mungkin walaupun masih terdapat beberapa kekurangan di beberapa aspek.

B. SARAN :

1. Perlunya upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan terhadap Sumber Daya Manusia yang ada dengan memberikan program pelatihan dan pengembangan yang berkualitas secara berkelanjutan kepada personil Teknis dan Non Teknis guna menghasilkan tenaga yang terampil dan profesional dalam bidangnya.
2. Perlu diadakan penambahan staf pada Pengadilan Negeri Sekayu, baik untuk bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.